

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku.

1. Dr. Junaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. 2016. Metode Penelitian Hukum. Normatif Dan Empiris. Jakarta : Prenada Media Group.
2. Prof. Dr. Soerip Soekanto, S.H., M.A. 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
3. Dr. Bachtiar, S.H., M.H. 2018. Jakarta : Universitas Pamulang Press.
4. Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.H., Dan A'an Efendi, S.H., M.H. 2013. Penelitian Hukum Legal Research. 2013 . Jakarta : Sinar Grafika.
5. Dr. Muhaimun, S.H., M.Hum. 2020. Metode Penelitian Hukum. NTB : Mataram University Press.
6. Prof. Dr. dr. Sutaryo, Sp. A (K)., Dr. Dea Sella Sabrina., Dr. Lintang Sagoro., dr. Natasha Yang. 2020. Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19). Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
7. Linda Lestari., Firza Ghozalba., Radito Pramono Susilo., Dyah Rusmiasih. 2020. Buku Saku Pencegahan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19 : Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta Timur.
8. Prof. Dr. Widodo Muktiyo. 2020. Strategi Komunikasi Dan Diseminasi Informasi Publik Pemerintah Terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jakarta : Dirjen Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI.
9. Divisi Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Provinsi Jawa Timur. 2020. Buku Panduan Gotong Royong Dalam Melawan Covid-19. Surabaya : Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

10. Badan Penanggulangan Bencana. 2020. Buku Saku Pencegahan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19. Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana.

B. Jurnal.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. Staf Badan Konsultasi Hukum Universitas Diponegoro. 2020. Semarang : Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) volume 7 Edisi I.

C. Internet.

1. <https://www.kompas.com> > Tren, tanggal 29 April 2020. Arti Hipendemi, Perbedaan dari Endemi dan Pandemi. <https://www.cnnindonesia.com> . teknologi diakses tgl 26 Agustus 2021
2. Arti Kata Pandemi-Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id> > pandemi
3. Analisa Konsep Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Oleh Kajari Bone. https://www.kejari_bone.go.id > detail. Diakses tanggal 04 Juli 2020.
4. Warna Zona di Jabar Akan Berubah Mengikuti Gugus Tugas Pusat <https://www.faktaindonesianews.com> > fakta-peristiwa diakses tanggal 14 Juli 2020.
5. Azas Legalitas-Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia. <https://id.wikipedia.org> > wiki > asas_legalitas, dirilis tanggal 16 November 2021
6. Pengertian Penegakan Hukum Serta Unsurnya. <https://www.duniapengertian.com> > seputar Hukum. Referensi Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung.

7. Apa yang dimaksud dengan Penegakan Hukum di Indonesia, <https://tirti.id/gke5>, oleh Ega Krisnawati, dirilis tanggal 08 Okt 2021.
8. Perlindungan-Dan-Penegakan-Hukum-Di-Indonesia-5974/, <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech>, dirilis tanggal 24 Juli 2020.
9. Tugas Dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-apar-penegak-hukum-lt6230538b64c71?page=all>, dirilis tanggal 15 Maret 2022.
10. Apa Definisi Ketertiban Umum, <https://www.hukumonline.com/klinik>, Amrie Hakim, SH, dirilis tanggal 2 November 2011.
11. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH, Aspek Perlindungan Kesehatan Hukum Dalam Perlindungan Kesehatan Dan Kedokteran, <https://fh.umj.ac.id>
12. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat, <https://www.neliti.com.id/publication>.
13. Istana Ungkap Alasan Presiden Pilih PSBB Dibanding Lock down, <https://www.republika.co.id/berita/083nhv354>, dirilis tanggal 01 April 2020.
14. Alasan Pemerintah Terapkan PSBB: Masyarakat Tak Disiplin, <https://katadata.co.id> > Nasional
15. Metode Penelitian-Repository Universtas International Batam, <https://repository.uib.ac.id> > s_1451007.chapter 3.

D. Perundang-Undangan.

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
3. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Di Kabupaten Bekasi.

4. Peraturan Bupati.Bekasi Nomor 48 tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) di Kabu

